
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA MADRASAH ALIYAH ALKHAIRAAT PUSAT PALU

Wahyu Aldat

Universitas Tadulako

Suasa

Universitas Tadulako

Asrifai

Universitas Tadulako

Korespondensi penulis: aldatwahyu7@gmail.com

Abstract. *This research aims to determine and analyze the implementation of the School Operational Assistance Fund (BOS) Program at Madrasah Aliyah Alkhairaat Central Palu. The research method used was qualitative, and the research informants were determined proportionally who were deemed to understand the problems being studied. The informants were the Head of the Section for Islamic Religious Education, Head of the Palu Central Aliyah Alkhairaat Madrasah, Madrasah BOS Treasurer, Madrasah Committee, Students and Parents. / Guardians of Students. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection was carried out by means of observation, interviews and documentation. The results of the research show that the implementation of the Operational Assistance Fund Policy at Madrasah Aliyah Alkhairaat Central Palu has not gone well. Because based on George C Edward III's theory used in this research which consists of (4) Four Aspects, there are still two aspects that are not working optimally. The aspect that has been running optimally is the disposition aspect which is sufficient to support the Implementation of the School Operational Assistance Fund Policy at Madrasah Aliyah Alkhairaat Central Palu, the second aspect which is considered successful is the Bureaucratic Structure aspect which has been running well where all implementors have worked according to their duties and their respective functions. Meanwhile, the communication aspect is one of the main aspects in implementing this policy, communication is the main route for implementing each program. Research results show a lack of communication in the form of socialization carried out by implementors, thus hampering the implementation of the school operational assistance fund policy at Madrasah Aliyah Alkhairaat Central Palu. Meanwhile, from the aspect of human resources, the Madrasah BOS Management is less skilled, resulting in technical obstacles such as the delay in Madrasah BOS Accountability Reports, so this is the influence on the success of the Implementation of the School Operational Assistance Fund Policy at the Palu Central Aliyah Alkhairaat Madrasah.*

Keywords: *Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pusat Palu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dan informan penelitian ditentukan secara proporsional yang dianggap memahami permasalahan yang diteliti, adapun yang menjadi informan adalah Kepala Seksi Bidang Pendidikan Agama Islam, Kepala Madrasah Aliyah Alkhairaat Pusat Palu Bendahara BOS Madrasah, Komite Madrasah, Peserta didik dan Orang Tua/ Wali Peserta Didik. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional pada Madrasah Aliyah Alkhairaat Pusat Palu belum berjalan dengan baik. Karena berdasarkan teori George C Edward III yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari (4) Empat Aspek, bahwa masih terdapat dua aspek yang belum berjalan secara optimal. Aspek yang sudah berjalan secara optimal yaitu aspek disposisi yang cukup mendukung Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pusat Palu, aspek kedua yang dinilai berhasil yaitu aspek Struktur Birokrasi yang sudah berjalan dengan baik yang dimana semua implementor sudah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Sedangkan aspek Komunikasi merupakan salah satu aspek utama dalam implementasi kebijakan ini, komunikasi menjadi jalur utama untuk pelaksanaan setiap program dari hasil Penelitian Menunjukkan Kurangnya Komunikasi dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan Implementor sehingga menghambat

*IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PADA MADRASAH ALIYAH ALKHAIRAAT
PUSAT PALU*

Implementasi kebijakan dana bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Aliyah Alkhairaat Pusat Palu. Sedangkan dari aspek Sumber daya manusia kurang terampilnya Pengelola BOS Madrasah sehingga terjadi kendala teknis seperti Lambatnya Laporan Pertanggung Jawaban BOS Madrasah sehingga hal ini lah yang menjadi pengaruh keberhasilan Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Aliyah Alkhairaat Pusat Palu

Kata Kunci: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang secara sadar dan disengaja,serta penuh tanggung jawab dilakukan orang dewasa kepada anak sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak dewasa dan berlangsung terus menerus semenjak dilahirkan sampai meninggal. Dengan pendidikan diharapkan dapat menghasilkan manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab serta mampu melalui masa depan. Pendidikan dalam kaitannya dengan manusia sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat adalah upaya pengembangan kepribadian agar mampu memenuhi kebutuhan pribadi dan menyumbangkan kemampuannya untuk Masyarakat. Untuk menyelenggarakan pendidikan, pemerintah perlu menetapkan serangkaian kebijakan pendidikan. Ada tiga pilar kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan yaitu: 1) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan, 2) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, 3) Tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Permasalahan Pendidikan di Indonesia adalah terbatasnya akses pendidikan terutama untuk masyarakat miskin. Masih banyak anak-anak bangsa yang masih berusia sekolah tidak dapat mengenyam pendidikan yang disebabkan oleh beberapa faktor, terutama faktor ekonomi. Keadaan tersebut tentu harus diperbaiki agar hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dapat terpenuhi sekaligus untuk pencapaian sasaran program Wajib belajar 11 tahun. Oleh karena itu pemerintah melalui departemen pendidikan nasional mencanangkan kebijakan dana BOS. Sebagai pendamping dari program wajib belajar yang di canangkan pemerintah. Sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung juga kurang memadai sehingga untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri manusia sangatlah sulit. Pendidikan di Indonesia terbelakang termasuk yang terbelakang dibanding negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, Dilihat dari sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia masih tertinggal. Baik dari segi bangunan dan fasilitas yang mendukung pendidikan bahkan bangunan sekolah yang ada didaerah pedalaman Indonesia bisa dibilang seadanya saja. Tenaga pendidikannya pun masih ada yang suka rela dan belum profesional apalagi fasilitas yang mendukung pendidikan masih kurang dari yang di harapkan. Bagaimana pendidikan di Indonesia mau maju kalau sarana dan prasarananya masih seadanya seperti itu. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan suatu organisasi pemerintahan yang bergerak dibidang pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidikan dan pengajaran tingkat menengah serta pendidikan formal dan non formal, pendidikan merupakan hal sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional yang merupakan salah satu penentu kemajuan bagi suatu negara.

Selain Dinas Pendidikan, Kementrian Agama juga merupakan suatu organisasi pemerintahan yang bergerak dibidang pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidikan Islam dan pengajaran tingkat menengah serta pendidikan formal dan non formal, pendidikan merupakan hal sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional yang merupakan salah satu penentu kemajuan bagi suatu negara.

Program BOS yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara Signifikasi

dalam percepatan mencapai program wajib belajar 11 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. Dan BOS mengalami perubahan mekanisme penyaluran dari transfer ke Kabupaten/Kota pada tahun 2011 menjadi transfer ke Provinsi selanjutnya di transfer ke rekening sekolah secara Online pada tahun 2012. Dana BOS dari rekening satuan kerja provinsi dilembaga penyaluran yang ditunjuk dikirimkan ke rekening sekolah penerima BOS sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Dinas Provinsi dengan lembaga penyalur tersebut yang juga di atur dalam petunjuk teknis penyaluran BOS. Pemerintah juga telah mengambil kebijakan yang tergolong spektakuler yakni mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Disadari sepenuhnya bahwa mengurus pendidikan tidak mudah karena permasalahan dalam dunia pendidikan tergolong kompleks.

Bahkan beberapa pandangan menyatakan membenahi pendidikan di Indonesia ibarat mengurai benang kusut. Dari mana memulai dan ke mana mengakhirinya sulit ditentukan. Akan tetapi satu hal dapat dipastikan bahwa pendidikan bukan hanya persoalan gedung sekolah, kurikulum, dan beasiswa atau bantuan sekolah (dana). Oleh karena itu, kebijakan pemerintah tidak hanya menyentuh aspek fisik dan dana melainkan juga terkait dengan regulasi. Regulasi sangat penting sebagai payung yuridis yang melegalkan pelaksanaan seluruh program dan proses pendidikan. Berdasarkan pemikiran itu, maka pemerintah telah menggulirkan berbagai aturan untuk mendukung pembangunan bidang pendidikan. Beberapa regulasi dapat dikemukakan, seperti; UU Sisdiknas nomor 2 tahun 1989 dimaksudkan sebagai payung utama mengawal dan memperlancar proses pemutuan pendidikan yang kemudian dirubah menjadi UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Regulasi lain adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dengan PP ini, maka semua satuan pendidikan dikelola dan dikembangkan berdasarkan delapan SNP yang sama. Kedelapan SNP dimaksud yakni; Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Penelitian dan Standar Pembiayaan. Pembiayaan pendidikan hendaknya dilakukan secara efisien. Makin efisien suatu sistem pendidikan, semakin kecil dana yang diperlukan untuk pencapaian tujuan-tujuan pendidikan. Untuk itu, bila sistem keuangan sekolah dikelola secara baik akan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Artinya, dengan anggaran yang tersedia, dapat mencapai tujuan-tujuan pendidikan secara produktif, efektif, dan relevan antara kebutuhan di bidang pendidikan dengan pembangunan masyarakat. Untuk mencapai hal-hal seperti di atas maka diperlukan adanya proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan melaporkan kegiatan bidang keuangan agar tujuan sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Mengacu uraian di atas, maka perlu dipandang penting salah satu program pemerintah untuk peningkatan mutu pendidikan adalah adanya bantuan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimana dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja personalia maupun nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana bantuan Operasional sekolah dimaksud dikategorikan pada dana BOS untuk sekolah atau Madrasah dimana Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan

belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah adapun diterbitkannya peraturan terbaru tentang petunjuk teknis penggunaan dana BOS di Madrasah adalah Keputusan Direktoral Jendral Pendidikan Islam No 304 Tahun 2023 Tentang atas perubahan keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam No 6601 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Tekhnis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah/ Madrasah Tahun 2023.

Secara Konsep Program Bantuan Operasional sekolah/Madrasah di berikan Untuk Mengurangi beban Masyarakat, Khususnya masyarakat yang miskin atau Masyarakat yang kurang mampu agar bisa mendapatkan layanan pendidikan wajib belajar yang memadai dan bermutu dan juga Untuk Meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan. Berdasarkan Obsersvasi dan Pengamatan di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pusat Palu terdapat beberapa indikasi yang dapat menunjukan bahwa Implementasi Program Dana bantuan Operasional Sekolah di Madrasah Aliya Alkhairaat Pusat palu belum Berjalan dengan maksimal ini dibuktikan dengan kenyataan di lapangan masih ada siswa yang kurang mampu belum mendapat layanan pendidikan yang memadai seperti tetap saja mereka di bebani dengan biaya pendidikan seperti kegiatan ekstrakurikuler yang seharusnya sudah menjadi tanggungan dana BOS, berdasarkan hasil observasi di lapangan Peserta didik Madrasah Aliyah Alkhairaat Pusat palu pada tahun 2023 yaitu sebanyak 527 peseta didik yang di mana akumulasi angka tersebut terbagi dari peserta didik kelas X (sepuluh), XI (sebelas) dan XII(dua Belas). Permasalahan lain pelaksanaan Program dana Bos di Madrasah Aliyah yang selama ini terkendala dalam pembuatan RKAM yang dimana sekolah/ Madrasah harus membuat RKAM sebelum Pencairan dana BOS akan tetapi pada kenyataannya di lapangan Tim Manajemen BOS Madrasah dalam hal ini seringkali mengalami keterlambatan dalam penyusunan RKAM, masalah ini terjadi di karenakan sumberdaya (staf) yang kurang dalam pengelolaan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah, seperti yang kita ketahui bahwa Sumber daya adalah merupakan kemampuan yang dimiliki dan menjadi pendukung proses pelaksanaan program baik dari segi sumberdaya manusia (staf) maupun Finansial. Selain permasalahan di atas menurut observasi di lapangan yang di mana tidak adanya keterlibatan Komite Madrasah, padahal seperti yang kita ketahui keterlibatan komite Madrasah merupakan hal yang penting sehingga dapat mendukung peningkatan mutu, akses pemerataan dan tentunya mencapai efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan melalui Program BOS Madrasah. Komunikasi yang di lakukan Pihak madrasah dalam keterlibatan pengelolaan dana BOS Madrasah terkesan tertutup dan tidak melibatkan komite dalam menyusun RKAM, Berdasarkan uraian diatas Program Bantuan Operasional (BOS) merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan demi terciptanya peningkatan kualitas pendidikan yang baik. Oleh karena itu untuk mengetahui dan Menganalisis bagaimana Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) berjalan di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pusat Palu. Maka dari itu peneliti mengangkat Judul :

“ IMPLEMENTAS PROGRAM DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PADA MADRASAH ALIYAH ALKHAIRAAT PUSAT PALU “

KAJIAN TEORITIS

Kebijakan Publik

Secara entimologi istilah kebijakan publik terdiri dari dua suku kata yaitu kebijakan atau plicy dalam bukunya poerwadarmita Kamus Umum Bahasa Indonesia (1984:138): diartikan dengan beberapa makna,kepandaian, kemahiran dan kebijaksanaan. Berdasarkan

definisi yang terdapat dalam Kmaus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) kebijakan diartikan sebagai berikut:

“Kebijakan rangka konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintah, organisasi dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran”.

Banyak pendapat yang dikemukakan oleh para pakar kebijakan mengenai pengertian kebijakan publik, dan kesemuanya tidak ada yang keliru dan saling melengkapi. Berbagai pandangan para ahli dalam mendefinisikan kebijakan `public membuktikan bahwa kebijakan public tidak bisa dimaknai secara seragam. Masing-masing dari para ahli memiliki perspektif dan pemaknaan yang berbeda-beda. Namun demikian, kebijakan secara umum dimaknai sebagai,1“serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat, maka dengan demikian kepentingan rakyat adalah keseluruhan yang utuh dari paduan dan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan-keinginan dan tuntutan-tuntutan dari rakyat.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Subarsono (2013:99), ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

1. Standard dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi. Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standard an sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standard an sasaran tersebut.

2. Sumber daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non manusia (*non human resources*). Dalam berbagai kasus program pemerintah, seperti Program Dana Bantuan Operasional Sekolah/ Madrasah untuk Meringankan Beban Masyarakat Untuk menyekolahkan anaknya berhasil karena keterbatasan kualitas aparat pelaksana.

3. Hubungan antar Organisasi.

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

4. Karakteristik agen pelaksana

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma- norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

6. Disposisi implementor

Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu : (1) respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (2) Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; (3) Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administrasion* dan *public policy*. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, adalah : melakukan *Standar Oprating Prosedures (SOPs)* dan melaksanakan *Fragmentasi*. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa beberapa unit kerja.

Edwards III dalam Winarno (2005:150) menjelaskan tentang ”*Standard Operational Procedure (SOP)* dan fragmentasi” sebagai berikut :

”*Standard operational procedure (SOP)* merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”. Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Berdasarkan hasil penelitian Edward III yang dirangkum oleh Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa:

”SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan- kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi”.

”Namun demikian, di samping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini”.

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi. Edward III dalam Winarno (2014:209) menjelaskan bahwa ”fragmentasi merupakan

penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi”. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Berikut hambatan-hambatan yang terjadi dalam fragmentasi birokrasi berhubungan dengan implementasi kebijakan publik.(Winarno,2014:210):

”*Pertama*, tidak ada otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan karena terpecahnya fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang berbeda-beda. Di samping itu, masing-masing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan terlantarkan dalam berbagai agenda birokrasi yang menumpuk”.

”*Kedua*, pandangan yang sempit dari badan yang mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan esensinya dan besar kemungkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan”.

Dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas mengenai definisi, teori-teori / model tentang implementasi kebijakan publik penulis dapat menyimpulkan bahwa, implementasi kebijakan publik merupakan satu tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan publik dimana suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan tidak akan berarti/bermanfaat apabila kebijakan tersebut tidak di implementasikan.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori George Edward III sebagai alat analisis. Adapun yang menjadi alasan penulis menggunakan teori ini dalam penelitian penulis berkaitan dengan implementasi kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah dapat dilihat dari 4 aspek dan sub aspek yang termuat dalam teori Edward III.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian secara kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia Catherine Marshal (1995) dalam Sarwono J (2006:193). Dasar penelitian ini menunjukkan beberapa kata kunci, yaitu: proses, Pemahaman, kompleksitas, interaksi, dan manusia. Proses dalam melakukan penelitian merupakan penekanan dalam penelitian secara kualitatif, oleh karena itu dalam melaksanakan penelitian harus lebih berfokus pada proses dari pada hasil akhir.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam pengumpulan data. Pendekatan kualitatif ini digunakan dalam rangka mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata yang berwujud atau pernyataan-pernyataan verbal tertulis dari orang atau sampel yang digunakan sebagai responden penelitian melalui berbagai macam teknik pengumpulan data yaitu wawancara, analisis dokumen dan diskusi terfokus. Pendekatan kualitatif ini digunakan dalam rangka mendapatkan deskripsi berdasarkan proposisi teori untuk menemukan solusi terhadap kendala yang terjadi dengan mengintegrasikan teori dan metode penelitian.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti akan mendeskripsikan, menulis dan mempresetasikan secara rinci dalam penelitian ini berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Aliyah Alkhairaat Pusat Palu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Perguruan Alkhairaat yang berdiri pada tahun 1930 M. Alkhairaat Pusat Palu, didirikan oleh Al' Alimul 'Allamah sayyid Idrus bin Salim Al Jufri adalah seorang ulama besar dari Yaman yang mempunyai keturunan Bugis dari pihak Ibu, sementara dari pihak Bapak, beliau adalah keturunan Rasulullah saw. dari garis Husain bin Ali bin Abi Thalib ra. dan Fatimah binti Muhammad saw. Warga Palu dan sekitarnya mengenal beliau dengan panggilan "Guru Tua" . Beliau mendirikan perguruan yang diberi nama Alkhairaat. Nama Alkhairaat dinyatakan dalam al Qur'an pada tujuh surah dan sembilan ayat, diantaranya : Qs(2): 148, Qs (3): 114, Qs (5): 48. Sejak berdirinya Madrasah Aliyah Alkhairaat Pusat Palu mengalami banyak perubahan, baik dari segi sarana dan prasarana yang dimiliki, tenaga pengajar dan kualitas siswanya. Walaupun belum banyak memiliki prestasi tetapi MA. Alkhairaat Pusat Palu merupakan salah satu madrasah yang diperhitungkan di tingkat madrasah yang ada di Propinsi Sulawesi Tengah dan diprediksi dapat menjadi salah satu madrasah yang maju dan unggul baik dari segi kualitas siswa dan dapat bersaing dengan sekolah lainnya. Hal ini dapat dilihat dari nilai ujian Madrasah yang setiap tahunnya lebih tinggi dari madrasah lainnya dan kemampuan ekstrakurikuler siswa yang mampu bersaing bahkan lebih unggul dari siswa madrasah lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.

Pembahasan Penelitian

Hasil penelitian ini merupakan data yang ditemukan secara faktual di lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang mengacu pada teori implementasi menurut Edward III, ada empat hal penting yang harus diperhatikan bahwa pelaksana kebijakan yang melaksanakan harus mengetahui apa yang mereka lakukan sehingga implementasi kebijakan dapat terlaksana kemudian akan dikaji dengan memakai 4 (empat) aspek yaitu :

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Aliyah Alkhairaat Pusat Palu.

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan stunting dapat disampaikan pada hasil penelitian sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik. Kegiatan komunikasi untuk memastikan apakah implementasi sudah sesuai dengan isi kebijakan publiknya. Komunikasi memang memainkan peran penting bagi berlangsungnya koordinasi dan implementasi pada umumnya. Namun, komunikasi yang benar-benar sempurna sebetulnya merupakan kondisi yang sulit untuk bisa diwujudkan.

a. Transmisi

Transmisi merupakan faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Penyaluran informasi yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula. Transmisi dalam Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Aliyah Alkhairaat Pusat palu berupa penyampaian informasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kemudian diteruskan kepada Pemohon Bantuan BOS Madrasah.

Dari hasil wawancara bahwa selama ini sosialisasi tentang Kebijakan Dana BOS Madrasah sangat penting karena hal ini menyangkut dengan Pengurangan Beban masyarakat. Adapun sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pihak

terkait seperti Kementrian Agama Kota Palu Bagian seksi Pendidikan Agama Islam yaitu dalam kegiatan yang dilaksanakan setiap Tahun dengan melibatkan Madrasah yang ada di Lingkungan Kota Palu. Namun hal ini di lakukan hanya beberapakali dalam setahun sehingga seringkali pengelola BOS Madrasah menemukan kendala Tehknis seperti pelaporan pertanggungjawaban dana BOS yang seringkali terlambat dan juga kurang terampilnya sumber daya manusia yang pengelola BOS Madrasah dalam menyerap informasi tentang Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Sehingga hal ini menyebabkan informasi tidak tersampaikan secara jelas dan terperinci kepada Pengelolah BOS Madrasah.

b. Kejelasan

Mengenai kejelasan pesan yang disampaikan oleh para komunikator atau penyampai pesan, Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan dapat diketahui bahwa terdapat adanya kejelasan pesan yang disampaikan dari para pelaksana kebijakan implementor, walaupun dari sisi lain masih terdapat kendala seperti kurangnya kegiatan BIMTEK yang di lakukan Pihak Kemntrian Agama Kota Palu bagian Seksi Pendidikan Agama Islam karena setiap kegiatan sosialisasi hanya di lakukan Secara Daring dan membuat madrasah atau pihak penerima Bantuan masih merasa belum cukup dengan kejelasan Informasi dan bimbingan tehknis yang dilakukan oleh pihak Implementor .

c. Konsistensi

Konsistensi merupakan indikator ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi. Konsistensi yang dimaksud adalah melihat bagaimana konsistensi dari pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Aliyah Alkhiaaraat Pusat Palu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa telah ada konsistensi pesan kepada target group (madrasah), artinya tidak ada pesan yang saling bertentangan atau kontradiktif.

Edward III (dalam Agustino, Leo. 2012:150-154) menyatakan bahwa Persyaratan pertama agar implementasi kebijakan dapat berfungsi efektif adalah mengetahui apa yang harus dilakukan. Sebuah kebijakan dan instruksi implementasi harus ditransmisikan secara tepat sebelum dilaksanakan. Komunikasi seperti ini harus akurat dan harus dipahami oleh para pelaksananya karena komunikasi membahas 3 (tiga) hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi,

Dalam hal komunikasi terhadap implementasi kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Aliyah Alkhairaat Pusat Palu : Transmisi kebijakan dana bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Aliyah Alkhairaat Pusat Palu sudah dilaksanakan oleh Kementrian Agama Kota Palu bagian Pendidikan Agama Islam . Hasil penelitian menemukan bahwa di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pusat Palu Komunikasi Bagian Transmisi sudah berjalan dengan baik ini dibuktikan dengan sampainya informasi kepada Pihak Madrasah.

2. Sumber Daya

Sumber daya (*resources*) yang dimaksud dalam implementasi kebijakan adalah pelaksana kebijakan. Agar dapat dilaksanakan dengan baik, kesiapan sumber daya pelaksana kebijakan public adalah hal penting untuk diperhatikan. Perintah untuk melaksanakan kebijakan mungkin telah disampaikan dengan akurat, jelas dan konsisten,

namun apabila para pelaksana kekurangan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, pelaksanaan kebijakan seperti ini akan menjadi tidak efektif.

Kesiapan sumber daya meliputi kualitas dan kuantitas staf pelaksana, ketersediaan informasi yang memadai, kewenangan yang diberikan kepada pelaksana serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan kebijakan. Kompetensi pelaksana kebijakan menentukan kualitas pelaksana kebijakan tersebut. Ketersediaan tenaga/personil yang cukup untuk pelaksanaan kebijakan adalah juga menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksana kebijakan.

Kompetensi SDM memiliki peran yang sangat menentukan dalam upaya mengubah dan meningkatkan kinerja organisasi. Kompetensi menyangkut kewenangan setiap individu untuk melakukan tugas atau mengambil keputusan sesuai dengan perannya dalam organisasi yang relevan dengan keahlian pengetahuan, dan kemampuan yang dimiliki.

Dalam hal sumber daya pendukung kebijakan Pelaksanaan BOS Madrasah, para informan mempunyai tanggapan yang beragam, namun dalam hal ini mereka sepakat perlu adanya peningkatan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun yang lainnya.

Sumber daya merupakan indikator kedua setelah komunikasi yang akan turut mempengaruhi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya kebijakan merupakan segala sesuatu yang digunakan guna mendukung terhadap berhasilnya kebijakan yang diimplementasikan. Berdasarkan hasil penelitian, untuk Pengelola BOS yang ada di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pusat Palu belum sesuai dengan kompetensi yang ada, atau tidak sesuai dengan disiplin ilmu. Dalam hal ini yang menangani adalah Guru dan Juga Staf TU sehingga perlu adanya dukungan dari orang yang betul paham tentang pengelolaan sehingga membantu dalam melaksanakan kebijakan tentang Implementasi Kebijakan dana bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Aliyah Alkhairaat Pusat Palu.

Jika diamati jumlah pegawai tersebut berdasarkan Tingkat Kualifikasi Pendidikan yang ada, dapat dikatakan bahwa Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Madrasah Aliyah Alkhairaat Pusat Palu dalam mengurus dana BOS dimana untuk jenjang Pendidikan, untuk S1 berjumlah 3 Orang dan tamatan SMA 1 orang. Sumber Hal tersebut menjadi bukti nyata, bahwa sumber daya yang kurang, serta daya materi atau sarana dan prasarana dapat mempengaruhi implementasi kebijakan yang efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kewenangan, empati para aparat. Dan salah satu unsur utama yang sangat perlu dipertimbangkan untuk perbaikan proses administrasi proposal pelayanan publik adalah masalah staf, namun perlu diingat bahwa jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi kebijakan berhasil.

3. Disposisi

Kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Oleh karena itu jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Berdasarkan hasil penelitian, komitmen dapat disimpulkan bahwa setiap

pelaksana kebijakan telah memiliki komitmen yang kuat untuk mensukseskan kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) khususnya di tempat kerja mereka. Namun dalam hal ini komitmen saja tidak cukup untuk mensukseskan sebuah program, dalam hal ini Program percepatan mencapai program wajib belajar 11 tahun. Komitmen ini harus dibarengi dengan kinerja yang baik dan terintegrasi secara terarah dengan mengedepankan aturan dan kebijakan. Tanpa kinerja yang baik, seberapa pun kuatnya komitmen, tidak akan menghasilkan apa-apa.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pemerintah oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah, guna mencapai tujuan serta sasaran tertentu yang diinginkan berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu. Faktor birokrasi pembagian kerja dalam implementasi kebijakan publik, menunjukkan pelaku- pelaku ahli dan profesional dalam tindakan-tindakan mengimplementasikan kebijakan publik.

Berdasarkan hasil penelitian, Desain struktur organisasi di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pusat Palu , yakni tingkatan struktur sederhana, dan juga disertai dengan diskresi yakni adanya kewenangan yang melekat secara fungsional pada tupoksi pada masing-masing pejabat sampai pada level bawah. Agar pelayanan bantuan dana berjalan lancar dan bertanggungjawab atas terselenggaranya pelayanan pada masyarakat khususn, agar pelaksanaannya cepat dan lancar, maka sebagian tugas tersebut didelegasikan/diserahkan pada bagian-bagian atau unit-unit birokrasi pada level bawah, sehingga manajemen puncak lebih banyak berfokus pada pengambilan kebijakan secara makro yang menyangkut kepentingan pengembangan organisasi ke depan.

Hasil penelitian tersebut diatas memperjelas eksistensi struktur birokrasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Edwards III (dalam Tangkilisan 2003) bahwa para implementor kebijakan mungkin tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki keinginan dan sumber daya yang cukup untuk melakukannya, namun mereka mungkin masih dicegah di dalam implementasi oleh struktur organisasi dimana mereka layani. Lebih lanjut dikatakan bahwa karakter utama dari birokrasi adalah prosedur pengoperasian standar (Standar Operasional Procedur) yang berkembang sebagai jawaban terhadap pelaksanaan kebijakan yang efektif, SOP dapat menjadi tidak efektif atau dengan kata lain bahwa SOP bisa benar-benar merintangangi implementasi kebijakan dalam berbagai cara, namun juga dapat membantu organisasi dalam mengadaptasi pada perubahan misalnya pengaruh lingkungan, maka SOP dapat dengan mudah melakukan reorganisasi substansial untuk menciptakan prasarana yang perlu untuk menyatukan perhatian lingkungan kedalam pembuatan keputusan yang baru seperti: merekrut personalia baru, membentuk tujuan baru termasuk membentuk lebih banyak perencanaan dari proyek.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai implementasi kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Aliyah Alkhairaat Pusat Palu yang dikaji menggunakan teori Edward III dalam Leo Agustino dengan empat aspek kebijakan, yakni: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. menunjukan bahwa

*IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PADA MADRASAH ALIYAH ALKHAIRAAT
PUSAT PALU*

Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Aliyah Alkhairaat Pusat Palu belum berjalan dengan baik. Ada 2 (dua) Aspek yang menjadi kendala dalam proses Implementasi Kebijakan dana BOS ini yaitu dari segi aspek Komunikasi yang dimana masih Kurangnya komunikasi yang dilakukan pihak Implementor dalam bentuk sosialisasi yang belum dilakukan secara optimal, Yang kedua yaitu sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan karena pada pelaksana teknis dilapangan masih sering terjadi beberapa kendala dalam penganggaran bantuan operasional sekolah, dari segi kompetensi dan keahlian sudah baik, namun buku-buku pada perpustakaan serta beberapa sarana Prasarana dirasakan belum mampu untuk mendukung oprasional belajar mengajar siswa-siswi pada Madrasah Aliyah Alkhairaat Pusat Palu secara optimal, hal ini dikarenakan sarana dan prasarana tersebut kurang begitu memadai.

Saran

Dari kesimpulan tersebut, terdapat beberapa hal yang disarankan demi perbaikan Pengelolaan Dana BOS Pada Madrasah Aliyah Alkhairaat Pusat lebih memaksimalkan implementasi program Dana Bantuan Operasional Sekolah di Madrasah Aliyah Alkhairaat Pusat Palu dengan memperhatikan aspek komunikasi melalui sosialisasi langsung (Tatap Muka) dan melengkapi sumber daya sarana dan prasarana setelah menerima bantuan operasional sekolah, terutama penambahan dan atau perawatan gedung, meja kursi serta penambahan alat olahraga dan kesenian dan juga Terus meningkatkan kerjasama dengan Kementrian terkait mengenai meningkatkan optimalisasi implementasi program Dana Bantuan Operasional Sekolah

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengakui bahwa dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti telah mendapat banyak bantuan, petunjuk, dan arahan dari tim pembimbing dan anggota tim pembimbing. Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat dan mendorong lahirnya karya ilmiah yang lebih baik kedepannya

DAFTAR REFERENSI

- Agustino, Leo, 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung Alfabeta.
- Moleong Lexy. (2007). *Dalam Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Edwar III, George C. (1980), *Implementing Public Policy*, Washington Dc: Congressional Quarterly Inc.
- Harsono, (2007). *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta : Pustaka Book Publisher.
- Nugroho, Riant, (2006). *Kebijakan Publik Untuk Negara Berkembang*. PT Elex Media Komputindo: Jakarra
- Abdullah M.Sy (1988). *Perkembangan dan Penerapan Study Implemtasi* Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Subarsono (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar.
- Van Meter, Donalds & Carl E Varn Horn , (1975) “ *The Policy Implementation Process: A: Consetual Frame Work “ Administration Society*. Vol. 6 dan 4 Februari 1975
- Leo Agustino. *Analisis Kebijakan Pembangunan di Desa Suligi Kecamatan Pandaian*. IV koto Kabupaten Rokan Hulu, J. Chem Inf. Model 53, 287 (2003)
- Tachjan ,”2006” *Implementasi Kebijakan public* Bandung : AIPI Bandung Puslit KP2W Lemlit Unpad.